

INDONESIA TANPA KEMISKINAN 2030, MUNGKINKAH?

Meiran Panggabean

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan Indonesia mencapai target SDGs tanpa kemiskinan (kemiskinan nol persen) di tahun 2030. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan terjadinya perbedaan pencapaian proporsi penduduk miskin di masing-masing propinsi. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif, kemiskinan nol persen di Indonesia tidak mungkin terwujud pada tahun 2030. Ada 4 dari 38 propinsi yang berpotensi mencapai kemiskinan nol persen di tahun 2030. Hambatan utama yang mewujudkan target *kemiskinan nol persen* tahun 2030, yaitu **ketimpangan pembangunan spasial, kualitas SDM dan pendidikan rendah, efektivitas tata kelola dan pendataan.**

Kata Kunci: Kemiskinan, Nol Persen, SDGs.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang telah ada sejak dahulu, dan hingga kini semua negara di dunia ini, baik negara terbelakang dan negara berkembang, maupun negara maju masih diperhadapkan pada masalah kemiskinan. Belum ada negara yang terbebas dari kemiskinan atau kemiskinan nol persen (*no poverty*). Amerika Serikat dan Jerman yang tergolong negara maju masih terbebani dengan penduduk miskin, masing-masing sebanyak 11,1% dan 15,5% tahun 2024. Demikian juga di negara Sudan Selatan dan Indonesia sebagai representasi negara terbelakang dan negara berkembang masih terbebani penduduk miskin sebanyak 92% dan 8,6% dari total penduduk.

Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama menuju kemiskinan nol persen harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Indonesia menggunakan indikator kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat kemiskinan. Indikator ini mengacu pada kondisi di mana pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga ia dikategorikan sebagai

penduduk miskin. Kemiskinan sendiri tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mualifah (2019) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain: (1) rendahnya tingkat pendidikan yang dicapai; (2) kebiasaan malas bekerja; (3) permasalahan dalam sektor ketenagakerjaan; (4) keterbatasan modal; (5) jumlah tanggungan keluarga yang besar; (6) terbatasnya sumber daya alam; (7) rendahnya kualitas sumber daya manusia; dan (8) rendahnya tingkat produktivitas.

Di Indonesia sendiri kemiskinan itu telah menjadi penyakit kronis masyarakat yang belum terselesaikan hilang sampai kini. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan hingga ke pedesaan. Capaiannya meskipun cenderung menurun, namun belum begitu menggembirakan. Masih jauh dari target SDGs 2030 yaitu nol persen. Sejak September 2015 hingga September 2024, kemiskinan di Indonesia menurun dari 11,13% menjadi 8,57% atau rata-rata berkurang 0,28% per tahun. Berbeda dengan Tiongkok, dimana penurunan kemiskinan lebih cepat dari Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Tiongkok telah mengalami penurunan signifikan periode 2015-2024. Tingkat kemiskinan di Tiongkok turun dari 24,60% pada tahun 2015 menjadi 10,5% pada tahun 2025 atau rata-rata menurun sebesar 1,41% per tahun.

Berbagai cara (strategi) sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sejak era MDGs (2000-2015) hingga era SDGs tahun ke 10 (2015-2025), baik strategi jangka pendek maupun strategi jangka Panjang. Strategi jangka pendek dalam pengentasan kemiskinan adalah melanjutkan berbagai program pemerintah yang sudah berjalan terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat antara lain melalui program bantuan sosial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Selain itu, terdapat beberapa program yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan akses lapangan kerja, program padat karya tunai (*cash for work*), serta peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan produktivitas.

Melihat luasnya dampak kemiskinan, hal ini merupakan permasalahan multidimensional yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Tidak hanya persoalan rendahnya pendapatan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan adalah inti dari permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak negara. Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai angka dasar (*baseline*) di tahun 2025.

1.2. Permasalahan

Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun, memiliki relevansi yang sangat penting untuk Indonesia yang tertuang dalam tujuan pertama pembangunan berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam dekade terakhir, masih ada sebagian besar populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di

daerah-daerah terpencil dan luar Jawa. Kemiskinan yang multidimensi yang mencakup akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pekerjaan yang layak masih menjadi tantangan besar bagi negara ini. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan dan memberikan akses ke sumber daya yang lebih baik.

Selama sepuluh tahun perjalanan SDGs (2015-2024) proporsi penduduk miskin di Indonesia menurun menuju target nol persen pada tahun 2030. Namun bila dicermati per propinsi, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh propinsi. Masih terdapat 12 propinsi yang proporsi kemiskinannya semakin meningkat. Keduabelas propinsi tersebut adalah propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kepulauan Riau; DKI Jakarta; Jawa Timur; Banten; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Gorontalo; Maluku; Papua Barat dan Propinsi Papua. Kemudian, terdapat 20 dari 38 propinsi (53%) yang persentase kemiskinannya melebihi nasional ($> 8,57\%$). Dengan fakta demikian ini menarik untuk diteliti kemungkinan Pemerintah Indonesia mencapai target SDGs tanpa kemiskinan (kemiskinan nol persen) di tahun 2030?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang Pemerintah Indonesia mencapai target SDGs tanpa kemiskinan (kemiskinan nol persen) di tahun 2030.

2. Kajian Literatur

2.1. Teori Kemiskinan

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih dan air minum, ketidakberdayaan, tidak ada keterwakilan dan kebebasan (Daryanto dan Yundi, 2012). Sementara itu, oleh BPS kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi, (BPS, 2024).

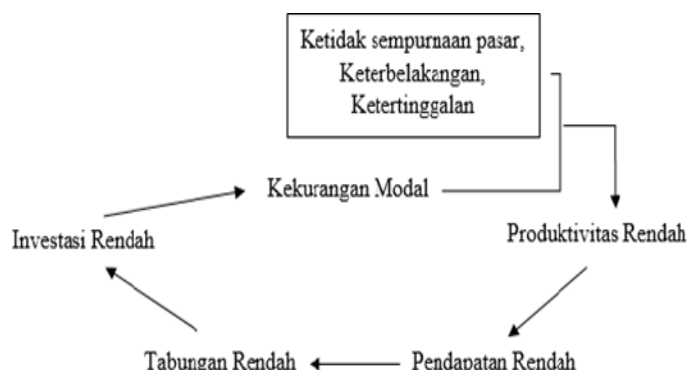
Tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan akar dari banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemiskinan juga membuat seseorang rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, partisipasi politik, serta keadilan hukum. Oleh karena itu harus dihapuskan atau di-nol-kan (*no poverty*). Dengan menghapus kemiskinan dapat menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Persoalannya tidak mudah menghapus kemiskinan. Butuh dana besar dan waktu panjang dalam proses Pembangunan. Ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya yang melimpah belum menjamin bebas dari kemiskinan seperti yang dialami Indonesia.

Masalah kemiskinan di Indonesia, tidak hanya muncul pada dikotomi desa kota saja, namun antar propinsi terjadi pula perbedaan yang sangat menyolok. Ada kecenderungan bahwa daerah-daerah yang paling banyak penduduk miskin umumnya merupakan daerah-daerah yang terpencil dan jauh jangkauannya dari transportasi. Faktanya, pada periode 2014-2024, proporsi penduduk miskin di Pulau Jawa berkisar 3,0 – 12,5% lebih kecil dari proporsi penduduk miskin di Pulau Papua berkisar 20,0 – 29,0%. Pulau Papua mempunyai topografi yang kurang

menguntungkan sehingga menjadi kendala untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan darat, baik antar kabupaten maupun antar kecamatan. Kondisi demikian ini berdampak pada terisolasinya penduduk setempat dari jangkauan pasar, informasi, dan teknologi yang pada akhirnya semua itu menjadi sumber penyebab kemiskinan.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi (*reciprocal*) seperti digambarkan dalam pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Ragnar Nurkse mengemukakan lingkaran setan kemiskinan dalam bukunya yang berjudul "*Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*", yang diterbitkan pada tahun 1965 (Kuncoro, 2006 ; Shamim, 2022). Nurkse melihat kemiskinan sebagai fenomena yang disebabkan oleh pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, pembentukan modal rendah, produktivitas rendah, dan lapangan kerja rendah (Hashim *et al.*, 2016).

Lingkaran ini kemungkinan akan terus berlanjut, kecuali jika ada intervensi dari luar. Siklus kemiskinan terkadang disebut perangkap pembangunan ketika diterapkan pada negara-negara berkembang. Alasan lingkaran setan tersebut telah diklasifikasikan menjadi; penyebab sisi penawaran, penyebab sisi permintaan, dan penyebab pasar yang tidak sempurna. Penyebab dari sisi penawaran menunjukkan bahwa negara-negara yang kurang berkembang kurang berkembang karena produktivitas mereka terlalu rendah, dan mereka tidak dapat mendorong pembentukan modal. Demikian pula, permintaan menyebabkan daya beli rendah karena pendapatan rendah. Akhirnya, kondisi pasar yang tidak sempurna terjadi karena sumber daya kurang berkembang dan warga negara terbelakang secara ekonomi. Kondisi yang tidak sempurna ini membatasi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Teori ini menjelaskan mengapa Nigeria tidak dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pertama untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Produktivitas rendah di Nigeria karena investasi rendah, yang mengakibatkan rendahnya tabungan. Teori ini telah dikritik karena pembangunan di negara-negara terbelakang terhambat oleh kurangnya modal dan kemampuan pengambilan keputusan yang buruk. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan yang saling berkaitan tersebut menciptakan siklus yang terus berulang, di mana ketidaksempurnaan pasar seperti keterbatasan ekonomi serta keterbelakangan dan ketertinggalan dalam pendidikan, semakin menghambat upaya peningkatan kualitas hidup penduduk miskin. Hal ini diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan

Sumber: Kuncoro (2006); Shamim (2022)

Memutus lingkaran setan kemiskinan membutuhkan intervensi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Program-program yang

berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber daya, dan pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk membantu individu dan keluarga keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis karena kedekatannya dengan masyarakat. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah pusat hingga pemerintah desa menjalankan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan spesifik wilayahnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel (Yacoub dan Lestari, 2019).

2.2 Teori Ketimpangan Geografis

John Kenneth Galbraith mengemukakan teori ketimpangan geografis kemiskinan dalam tesisnya yang berjudul "*The Position of Poverty*", yang diterbitkan pada tahun 1969 sebagai teori ketimpangan. Teori ini mengaitkan kemiskinan dengan kecenderungan geografis. Teori ini menekankan bahwa kemiskinan terjadi ketika orang, budaya, dan lembaga di lokasi tertentu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan, kesejahteraan, dan kekuatan yang memadai untuk menegaskan redistribusi (Omideyi, 2007).

Teori ini juga dibahas dalam proposisi aglomerasi ekonomi, yang mengungkapkan konsentrasi industri di lokasi tertentu dan menarik layanan dan pasar tambahan (Danaan, 2018; Omeje, Chukwu & Isiwu, 2022). Konsentrasi ini menarik lebih banyak industri, sementara daerah miskin memunculkan lebih banyak kemiskinan (Addae-Krankye, 2019). Di Indonesia, misalnya, konsentrasi geografis industri berada di wilayah Barat dan telah memperburuk kejadian kemiskinan di wilayah Timur. Distribusi kemiskinan antar wilayah menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah Bagian Barat Indonesia untuk pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagian besar memiliki tingkat kemiskinan rendah hingga menengah. Sementara itu, wilayah Bagian Timur Indonesia pada pulau Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara cenderung memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia yang relatif masih cukup besar.

Alisjahbana dan Endah (2018) menjelaskan, target untuk mencapai Tujuan SDGs mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Ukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada kemiskinan berdasarkan dimensi pendapatan, namun juga pengukuran kemiskinan berdasarkan juga pada akses terhadap layanan dasar serta akses sumber daya produktif lainnya. Beragam ukuran kemiskinan tersebut dijabarkan dalam beberapa indikator seperti tingkat kemiskinan ekstrim, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, proporsi penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pemerintah Indonesia serius dalam merespon isu kemiskinan dalam kerangka SDGs. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005- 2025 terlihat jelas bahwa pemerintah Indonesia memasukkan beberapa program terkait dengan kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi dua kelompok besar (Bappenas, 2017). Kelompok pertama terdiri dari program-program yang ditujukan hanya pada orang miskin. Jika program-program ini dilaksanakan secara efektif, maka keluarga-keluarga miskin yang benar-benar akan menikmati hampir seluruh manfaatnya. Kelompok program ini sangat tergantung pada pentargetan awal yang akurat untuk memastikan bahwa penerima manfaat teridentifikasi dengan benar. Kelompok kedua terdiri dari program program yang ditujukan tidak hanya untuk rakyat miskin tapi juga untuk masyarakat dari semua golongan pendapatan, tapi secara proporsional akan memberi manfaat lebih bagi rakyat miskin.

Pengentasan kemiskinan sudah dimulai sejak rezim orde baru, namun masih menyisakan persoalan hingga saat ini meskipun pemerintahan telah mengalami beberapa kali pergantian (Lubis, 2016). Beberapa program telah diupayakan pemerintah pada masa itu diantaranya program Inpres Desa Tertinggal, Tabungan Keluarga Sejahtera dan juga Kredit Usaha Rakyat. Beberapa program yang dicanangkan ataupun sudah dijalankan oleh pemerintah pada masa itu belum mampu menekan masalah kemiskinan secara signifikan. Program pengentasan kemiskinan juga terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi di Seluruh Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan bahwa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi: (a) Program Simpanan Keluarga Sejahtera; (b) Program Indonesia Pintar; (c) Program Indonesia Sehat (Sinaga, 2018). Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah setidaknya terbagi menjadi tiga program utama yaitu bantuan sosial (Bansos), Subsidi dan kompensasi serta Dana desa. Program bantuan sosial terbagi menjadi Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jenis program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM).

2.2. Tinjauan Empiris

Hamzah (2012) memaparkan perbedaan strategi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok untuk mengentaskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim demi tercapainya target MDGs yang pertama. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup strategi yang dilakukan. Strategi berupa pembuatan kebijakan yang diimplementasikan di Indonesia hanya dalam ruang lingkup nasional, namun strategi yang dimiliki Tiongkok memuat kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup internasional seperti kerjasama internasional dan bantuan luar negeri. Selain itu, penulis menggunakan konsep *poverty reduction* dan *food security* dalam membahas strategi pemerintah Tiongkok.

Primayanti, Luh Putu Ika, Idin, dan A.A.B Surya (2023) menyimpulkan bahwa pasca tahun 2000, strategi pemerintah Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim difokuskan dalam mencapai target pertama MDGs. Strategi pengentasan tersebut diformulasikan dalam bentuk komitmen, program dan kebijakan. Dalam pencapaiannya, Tiongkok menjadi negara berkembang pertama yang berhasil mencapai target pertama MDGs.

Dari hasil penelitian Rahmatullah, Endaryanto dan M.Irfan (2021), dapat dijelaskan bahwa hubungan antara variabel persentase tingkat kemiskinan terhadap variabel anggaran program pengentasan kemiskinan di Kota Pagar Alam, berkorelasi signifikan apabila anggaran terhadap program-program kemiskinan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, melainkan didorong pula dengan program pengentasan kemiskinan yang bersumber dari APBN.

Temuan Lindrianti (2022) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hasil penelitian Pratama (2020) di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan ada 4 (empat) program yang dijalankan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu

1. Program peningkatan rasio elektrifikasi
2. Program peningkatan kemudahan dalam mengakses air bersih/minum

3. Program penertiban dan penanganan terhadap beberapa lokasi kumuh yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Program peningkatan partisipasi pendidikan dari mulai tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas.

Program Dana Desa tidak selalu berhasil mengurangi penduduk miskin di desa. Hasil kajian Ismail *et al.* (2020) mengungkapkan bahwa Dana Desa dapat mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap dana desa tinggi, terutama dalam hal kemajuan sosial. Berbeda dengan Kajian Marsela, (2021) menemukan bahwa dana desa tidak mengurangi kemiskinan di Sumatera. Penelitiannya menemukan bahwa pengaruh dana desa hanya 17,4%, dalam pengentasan kemiskinan sedangkan 82,6% dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya (Fitriana & Qibthiyyah, 2021) mengatakan kebijakan Dana Desa 2015-2018 mengurangi kemiskinan pedesaan. Meski begitu, masih belum efektif karena perhitungan menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa memiliki hubungan negatif dan signifikan pada level 1% dengan jumlah penduduk miskin pedesaan. Terdapat hasil yang kurang memuaskan dimana lag pertama peningkatan Dana Desa sebesar Rp 1 miliar di kabupaten/kota hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin desa sebanyak 60 orang.

Hasil studi Djabar, *et al* (2022) tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menyimpulkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum memiliki nilai valid dengan persentase kumulatif tanggapan responden sebesar 79.51%. Berdasarkan analisis indikator pendekatan sumber, peran pendamping PKH dalam pelaksanaan dan arahan program sudah sangat efektif.

Ketidakberhasilan mengurangi angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial menurut Henri (2022) dikarenakan "mentalitas kemiskinan". Studi Henri (2022) di Nigeria menyimpulkan "mentalitas kemiskinan" telah diabaikan dari waktu ke waktu karena data empiris dan inisiatif kebijakan ekonomi makro telah difokuskan pada kemiskinan ekonomi (konsumsi, pendapatan, dan kekayaan). Namun, pengamatan terus-menerus telah menunjukkan bahwa penerima bantuan keuangan dari program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan terlibat dalam keputusan keuangan yang buruk, yang sering kali menyebabkan pengeluaran yang tidak berguna. Upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan multidimensi di Nigeria sesuai dengan SDGs secara signifikan terancam oleh "mentalitas kemiskinan".

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini hampir seluruhnya bergantung pada literatur baik fisik maupun digital. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan deskriptif kualitatif atau penelitian bibliografis karena mengandalkan data teoritis dan dokumentasi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, Artikel penelitian, dokumen dan publikasi lain tentang kebijakan pengentasan kemiskinan.

Untuk menjawab pertanyaan/tujuan penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode proyeksi lineier sederhana berbasis *trend* (*Simple Linear Trend Projection*). Artinya, diasumsikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan per tahun bersifat konstan (stabil) berdasarkan pola penurunan tahun 2020-2024. Metode ini mengandalkan: (1) Rata-rata laju

penurunan tahunan (annual reduction rate), dan (2) Koreksi kecil berdasarkan kategori tingkat kemiskinan (rendah, sedang, tinggi).

Langkah-langkah Perhitungan adalah (1) Menentukan titik awal yaitu baseline 2024 (2) Menentukan laju penurunan tahunan (rata-rata trend 2020–2024). Dari observasi data nasional dan provinsi BPS 2020–2024, pola penurunan tahunan terlihat sebagai berikut:

- a. Provinsi dengan kemiskinan rendah ($\leq 5\%$) → penurunan lambat ($\sim 0,4$ poin %/tahun)
- b. Provinsi dengan kemiskinan sedang ($5-10\%$) → penurunan sedang ($\sim 0,5$ poin %/tahun)
- c. Provinsi dengan kemiskinan tinggi ($10-15\%$) → penurunan lebih cepat ($\sim 0,8$ poin %/tahun)
- d. Provinsi dengan kemiskinan sangat tinggi ($>15\%$) → penurunan ambisius ($\sim 1,5$ poin %/tahun)
- e. Menghitung proyeksi 2030, dengan rumus : $P_{2030} = P_{2024} - (r \times 6)$ dimana :
 P_{2030} : persentase kemiskinan proyeksi tahun 2030
 P_{2024} : persentase kemiskinan tahun 2024 (data aktual/perkiraan BPS)
 r : rata-rata penurunan tahunan (berbeda per kategori)
 6 tahun = periode proyeksi (2024–2030)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Perbedaan Kemiskinan Antar Propinsi

Sebagaimana telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian bahwa masalah kemiskinan masih terus mewarnai proses pembangunan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Meskipun sudah berbagai program dijalankan untuk mengatasi kemiskinan, namun nyatanya hingga saat ini penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tetap ada. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa (9,36%). Secara nasional, angka kemiskinan ekstrem berhasil diturunkan dari 2,7 % pada 2019 menjadi 0,83 % pada Maret 2024. Diperkirakan pada tahun 2026, kemiskinan ekstrim tidak ada lagi alias mencapai nol persen.

Banyak program yang sudah dijalankan sejak dahulu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang sudah dan sedang dijalankan ada sebanyak 154 program dengan melibatkan 27 kementerian (<https://narotama.ac.id/berita/detail/32388>). Indonesia menjalankan ratusan program yang tersebar di banyak kementerian/lembaga dan meliputi berbagai intervensi (bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, jaring pengaman). Rahayu (2012) menyimpulkan terlalu banyak K/L yang mengelola anggaran Program Kemiskinan dengan pendekatan *top down*, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat miskin di daerah, menjadikan hasil yang tidak maksimal.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa program-bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti membantu dalam jangka pendek meningkatkan daya beli rumah tangga miskin (Ramadhani dan Widiya, 2024). Namun, evaluasi terhadap program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), menunjukkan bahwa banyak program masih menghadapi kendala mis-targeting, data yang belum mutakhir, kurangnya integrasi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Armelia, *et al*, 2025). Ada banyak program (154 program) yang berjalan, tetapi terdapat tumpang-tindih, koordinasi antar K/L yang masih lemah, data sasaran yang belum konsolidasi (Kompas.com, 2024). Walaupun secara nasional terjadi penurunan kemiskinan, hasilnya tidak benar-benar merata antar provinsi dan antar wilayah, sehingga masih terdapat

daerah yang stagnan atau bahkan naik angka kemiskinannya. Terdapat 6 (enam) propinsi yang penduduk miskinnya bertambah banyak periode 2020-2024, yaitu propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Berikut ini disajikan program-program utama terkait pengurangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian.

1) Kementerian Sosial (Kemensos)

Kemensos berperan langsung dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Adapun program-program utama yang dilakukan adalah (1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan & kesehatan keluarga miskin; (2) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako yang bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan keluarga miskin; (3) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui graduasi KPM; (4) Program Bantuan Sosial Tunai (BST)/BLT yang bertujuan untuk merespons guncangan ekonomi (mis. pandemi, inflasi); (5) Program Rehabilitasi Sosial (ATENSI, Lansia, Disabilitas) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan; (6) Program Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan (P2FM) yang bertujuan untuk penguatan kapasitas sosial-ekonomi di wilayah miskin; (7) Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (terpadu lintas K/L) yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 2025. Peran utama Kementerian Sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah menangani perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR berperan besar dalam penyediaan infrastruktur dasar, yang merupakan faktor kunci pengentasan kemiskinan. Program-program yang dilaksanakan meliputi : (1) Program Sejuta Rumah (PSR), bertujuan untuk memberikan akses hunian layak dan pengurangan kawasan kumuh melalui subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat desa melalui penyediaan infrastruktur air dan sanitasi; (3) Program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), program ini bertujuan untuk mengurangi penyakit berbasis lingkungan melalui pengadaan infrastruktur sanitasi lingkungan; (4) Program Infrastruktur Perdesaan (PIP), bertujuan untuk membuka akses ekonomi wilayah tertinggal melalui Pembangunan jalan desa, jembatan kecil dan drainase; (5) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan melalui revitalisasi kawasan padat miskin.

3) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)

Program Kemenkop UKM fokus pada pemberdayaan ekonomi dan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin dan rentan ekonomi. Program-program utama yang dilaksanakan antara lain adalah (1) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bertujuan untuk mendorong wirausaha dan membuka lapangan kerja melalui penyaluran kredit bersubsidi untuk UMKM; (2) Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang bertujuan untuk Pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan pemberian hibah modal usaha mikro; (3) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini bertujuan untuk penguatan kapasitas dan jejaring usaha mikro melalui pelatihan dan kemitraan usaha; (4) Program INKUBATOR Wirausaha/PLUT-KUMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha kecil melalui pendampingan bisnis dan pelatihan; (5) Program pemberdayaan UMKM Berbasis Digitalisasi. Program ini bertujuan untuk

mewujudkan transformasi ekonomi mikro ke arah inklusif melalui digitalisasi pemasaran dan transaksi.

4) Kementerian Pertanian (Kementan)

Program pengentasan kemiskinan Kementerian Pertanian difokuskan pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani yang mayoritas kelompok berpendapatan rendah. Program utama yang ditawarkan adalah (1) Program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui subsidi benih, pupuk, dan sarana produksi; (2) Program Peningkatan Nilai Tambah Petani (KUR Pertanian). Tujuan program ini adalah mempermudah akses modal kerja untuk petani miskin melalui kredit usaha tani; (3) Program *Food Estate* yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan menekan impor pangan dengan cara pembukaan pertanian skala luas dan modernisasi sektor pertanian; (4) Program Petani Milenial & Petani Mandiri, program ini bertujuan untuk mewujudkan regenerasi tenaga kerja pertanian melalui pelatihan dan pemberdayaan generasi muda; (5) Program Perluasan Lahan rawa dan Irigasi Desa yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di daerah tertinggal melalui Pembangunan infrastruktur pertanian dan air (irigasi)

5) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Peran Kementerian Perhubungan bersifat pendukung dalam pengentasan kemiskinan melalui aksesibilitas transportasi dan konektivitas wilayah tertinggal. Program utama yang dijalankan adalah (1) Program Tol Laut yang bertujuan untuk menekan disparitas harga antar wilayah melalui subsidi logistik dan transportasi antar wilayah; (2) Program Jembatan Udara/Angkutan Perintis. Program ini bertujuan untuk menjamin akses bahan pokok & mobilitas penduduk miskin di daerah terpencil melalui subsidi transportasi udara untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal); (3) Program Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga Pedesaan yang bertujuan untuk membuka isolasi ekonomi pesisir melalui Pembangunan konektivitas laut; (4) Program Bus *Buy The Service* (Transportasi Umum Murah) yang bertujuan untuk mempermudah akses transportasi terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan melalui subsidi transportasi publik.

6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)

Program Kemendesa PDTT dalam penanggulangan kemiskinan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Tujuan program Kemendesa PDTT adalah untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan daerah tertinggal. Program yang dilaksanakan adalah (1) pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan Masyarakat; (2) Program SDGs Desa dan (3) meningkatkan status desa untuk menjadi desa mandiri dan Transmigrasi produktif.

7) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Fokus utama Kemnaker dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan akses pekerjaan dan keterampilan tenaga kerja miskin. Program yang dijalankan antara lain peningkatan keterampilan tenaga kerja miskin melalui Balai Latihan Kerja (PLK) dan program tenaga kerja mandiri (TKM).

8) Kementerian PPN (Bappenas)

Kementerian PPN (Bappenas) dalam penanggulangan kemiskinan berperan sebagai koordinator kebijakan antar-kementerian dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Program utama yang dilakukan adalah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Stranas-PK).

9) Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Program Kemendikbudristek dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) berupa beasiswa/bantuan langsung untuk siswa; program Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP/BOSP untuk madrasah) berupa subsidi operasi sekolah agar biaya pendidikan tidak menjadi beban keluarga; program KIP Kuliah dan beasiswa pendidikan tinggi berupa bantuan/beasiswa untuk mengurangi hambatan biaya bagi pelajar dari keluarga miskin.

Mencermati program-program yang dijalankan oleh berbagai kementerian (27 kementerian), sangat besar kemungkinan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) program dalam implementasinya. Evaluasi lintas kementerian menunjukkan masih adanya tumpang tindih program antara Kemensos, Kemenkop-UKM, dan Kementan dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa daerah menerima intervensi ganda tanpa koordinasi, sementara wilayah lain justru belum tersentuh. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat, misalnya melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan integrasi data berbasis Satu Data Indonesia. Studi Sa'adih, *et al* (2023) menemukan masih terdapat sejumlah hambatan seperti fragmentasi birokrasi, belum terintegrasinya sistem data, ketimpangan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam proses pengentasan kemiskinan.

Contoh nyata dari pelaksanaan program yang tumpang tindih antara lain :

1. Tumpang tindih program PKH (Kemensos) versus Dana Desa (Kemendes PDTT) dalam bidang bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program kedua kementerian ini menyasar keluarga miskin, tetapi sering tidak koordinasi di lapangan (data penerima bantuan berbeda).

2. Tumpang tindih program Kemenkop UKM versus Kemensos versus Kemnaker dalam bidang pemberdayaan ekonomi UMKM. Ketiga kementerian ini memiliki program wirausaha bagi masyarakat miskin, namun tidak selalu terintegrasi dalam data dan pelatihan.

3. Tumpang tindih program Kementerian PUPR versus Kemensos dalam bidang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua kementerian ini sama-sama memberi bantuan rumah, tetapi mekanisme dan sasaran bisa tumpang tindih.

4. Tumpang Tindih Kemnaker versus Kemenkop UKM dalam bidang Pelatihan dan Ketenagakerjaan. Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha yang dijalankan kedua kementerian ini kadang dilakukan tanpa koordinasi lintas kementerian.

Kompleksitas kemiskinan yang bersifat multidimensi menuntut kolaborasi yang efektif antara berbagai kementerian. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa kemiskinan multidimensi memerlukan pendekatan lintas sektor. Evaluasi terhadap kinerja kementerian menjadi penting untuk menilai sejauh mana program-program tersebut berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia lebih banyak bersifat *top-down* dan karitatif. Menurut Saerang (2021), efektivitas kebijakan sosial bergantung pada tiga hal: akurasi sasaran, keberlanjutan intervensi, dan integrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Program yang hanya menyalurkan bantuan tunai tanpa pemberdayaan ekonomi berisiko tidak menciptakan perubahan struktural bagi masyarakat miskin.

Evaluasi kebijakan publik, menurut Dunn (2018), mencakup proses penilaian efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia,

model koordinasi lintas kementerian menjadi penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan (TNP2K, 2023).

Laporan Tahunan Program Perlindungan Sosial dari Kementerian Sosial (2024) mengungkapkan bahwa secara kuantitatif, PKH berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah melalui peningkatan daya beli rumah tangga. Namun, evaluasi dari Bappenas (2023) menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam validasi data penerima manfaat (DTKS) serta keterlambatan distribusi bantuan. Program PKH dan BPNT berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem hingga $< 3\%$ (BPS, 2024). Tantangan utama Kemensos adalah memperkuat akuntabilitas, *targeting* berbasis data terintegrasi, dan pemberdayaan berkelanjutan agar penerima tidak kembali miskin setelah bantuan berakhir. Kinerja Kemensos kuat di wilayah urban, namun masih lemah di wilayah timur dan 3T karena keterbatasan data dan akses logistik.

Evaluasi Program KOTAKU, BSPS dan Pembangunan infrastruktur pedesaan yang dilakukan Kementerian PUPR (2024) mengungkapkan bahwa kinerja Kementerian PUPR dinilai signifikan dalam mengurangi dimensi kemiskinan non-moneter. Akses terhadap air bersih dan perumahan layak berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, evaluasi menemukan bahwa dampak jangka panjang sering tidak terukur karena keterbatasan sistem monitoring berbasis *outcome*. Selain itu, program infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan peta kemiskinan daerah. Temuan Nugroho (2016) membuktikan bahwa ada peran infrastruktur dasar jalan, listrik, air, sekolah dan puskesmas) dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Kementerian PUPR berperan dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, sanitasi dan perumahan layak huni. Hingga tahun 2024, akses air minum layak sudah mencapai 91%, meningkat 21 persen dari capaian 2015 (70%). Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program adalah rendahnya kualitas infrastruktur di daerah tertinggal. Kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan struktural melalui infrastruktur dasar dan efektivitas keberhasilan tergantung dukungan daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan yang dilakukan oleh Bappenas (2023) menjelaskan bahwa program KUR dan INKUBATOR. Wirausaha terbukti meningkatkan akses pembiayaan pelaku UMKM dengan pertumbuhan penyaluran mencapai lebih dari 400 triliun rupiah (2023). Namun, sebagian penerima KUR bukanlah kelompok miskin ekstrem, sehingga dampak langsung terhadap kemiskinan masih terbatas. Diperlukan peningkatan *targeting* penerima, digitalisasi koperasi, dan integrasi dengan program sosial Kemensos agar pemberdayaan ekonomi lebih efektif dan inklusif. UMKM mikro masih sulit naik kelas karena. Ketercapaian program UMKM ini belum merata. Kinerja tinggi di kota besar, namun lemah di luar Jawa karena keterbatasan akses modal dan pendampingan bisnis. Emahnya digitalisasi.

Kementerian pertanian (2024) melalui program Kartu Tani, *Food Estate*, Program Serasi, dan Bantuan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) mengemukakan bahwa produktivitas pertanian meningkat di sejumlah wilayah sentra pangan, namun kesejahteraan petani tidak selalu naik seiring peningkatan produksi. Fluktuasi harga komoditas dan akses pasar yang lemah menjadi faktor penghambat. Evaluasi Bappenas (2024) menunjukkan perlunya reformasi dalam subsidi pupuk dan distribusi hasil panen agar lebih berpihak kepada petani kecil. Kementan efektif di Jawa, namun di wilayah luar Jawa terkendala SDM dan infrastruktur pertanian.

Kementerian perhubungan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui pembangunan konektivitas wilayah tertinggal, seperti program Tol Laut, jembatan udara, dan subsidi angkutan perintis. Akses transportasi di wilayah 3T semakin meningkat. Program

konektivitas meningkatkan distribusi logistik dan menurunkan disparitas harga antarwilayah, terutama di Indonesia Timur. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya integrasi dengan program ekonomi lokal dan produksi daerah. Untuk memperkuat dampak terhadap kemiskinan, Kemenhub perlu mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok transportasi dan logistik. Kinerja Kemenhub paling terlihat di daerah perkotaan dan strategis; di Papua masih butuh subsidi besar dan keberlanjutan.

Dana Desa yang dikucurkan oleh Kementerian Desa PDTT telah berhasil menurunkan kemiskinan dasar dari 13% (2015) menjadi 9% (2024) meskipun disertai dengan catatan “sebagian penggunaan dana desa belum produktif” (BPS, 2024). Sementara itu tenaga kerja yang dilatih setiap tahun melalui program pelatihan dan ketenagakerjaan dari Kemenaker, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa, belum sepenuhnya *link and match* dengan dunia kerja.

Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan Antar Kementerian di 4 propinsi disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Perbandingan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan Antar-Kementerian di Propinsi DIY, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Papua

Kementerian	DIY	DKI Jakarta	Kalimantan Barat	Papua
Kementerian Sosial (Kemensos)	Cakupan PKH & BPNT tinggi ($\pm 95\%$)	Penyaluran bansos digitalisasi penuh melalui DKI Smart Card	Distribusi bansos masih terkendala akses desa terpencil	Cakupan bantuan masih rendah (65%)
	Penurunan kemiskinan ekstrem signifikan (0,6%)	Kemiskinan ekstrem hampir nol (0,2%)	Kemiskinan ekstrem 1,8%	Kemiskinan ekstrem tertinggi (7%)
Kementerian PUPR	Program BSPS dan Pamsimas berhasil tingkatkan rumah layak huni (80%) dan akses air bersih (90%)	Fokus perbaikan kawasan kumuh & rumah susun pekerja urban	Akses air bersih naik dari 62% ke 75%	Program infrastruktur tertinggal masih berjalan lambat (progres $\pm 55\%$)
			Irigasi desa meningkat	
Kementerian Koperasi & UKM	Wirausaha mikro banyak tumbuh di sektor kuliner dan pariwisata	UMKM digital tumbuh pesat, integrasi e-commerce kuat	KUR rendah (60%) karena akses perbankan terbatas	Masih rendah (35%) karena minim literasi dan jaringan pasar
	KUR terserap 98%			

Kementerian Pertanian (Kementan)	Produktivitas pertanian tinggi di Sleman dan Bantul (padi & hortikultura)	Pertanian urban berkembang di lahan sempit	Produksi sawit & karet tinggi, namun petani kecil rentan harga	Ketergantungan pada bantuan benih & pupuk; hasil rendah
		Subsidi pupuk tepat sasaran		
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Akses transportasi antarkabupaten baik	Moda transportasi publik terintegrasi (MRT, LRT, TransJakarta) kurangi beban biaya warga miskin kota	Akses pelabuhan & bandara kecil meningkat (Pontianak, Sintang)	Transportasi udara perintis membantu logistik daerah 3T tapi biaya tinggi
	Dukungan logistik untuk pariwisata			
Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Sinergi BOS dan PIP memperkuat partisipasi sekolah siswa miskin	Membantu menurunkan beban biaya Pendidikan ditengah biaya hidup tinggi di Jakarat	Tantangan validitas data dan distribusi PIP ke daerah terpencil	akses layanan di daerah terpencil, tantangan data kependudukan (NIK/NISN) menyulitkan identifikasi penerima tepat sasaran.

Sumber : Diolah berdasarkan *data dan evaluasi kebijakan nasional 2023–2024* (Bappenas, Kemensos, dan BPS).

Pada Tabel 4.1. tampak adanya perbedaan kinerja program pengentasan kemiskinan antar Kementerian. Program penanggulangan kemiskinan oleh kelima Kementerian capaiannya lebih berhasil di Pulau Jawa. Keberhasilan di DKI Jakarta ditopang oleh kemajuan sarana prasarana disertai dengan kemajuan internet dan transportasi, seperti penyaluran bansos digitalisasi melalui DKI *Smart Card*; UMKM digital melalui *e-commerce* dan moda transportasi public yang terintegrasi. Di propinsi DKI, program pendidikan berperan sebagai mitigator (mengurangi risiko putus sekolah akibat biaya pendidikan relatif tinggi), tapi efek langsung ke penurunan kemiskinan Jakarta relatif kecil dibandingkan provinsi yang menunjukkan perubahan penurunan kemiskinan lebih besar. Proporsi penduduk miskin di Propinsi DKI semakin menurun dalam lima tahun terakhir, yakni dari 4,53% (2020) menjadi 4,30% (2024). Kemiskinan ekstrim hampir mendekati nol persen pada tahun 2024 yakni 0,2%.

Di Propinsi DIY, kinerja program kemiskinan dapat dikatakan sukses. Hal ini terbukti dari pencapaian cakupan PKH dan BPNT sekitar 95%; rumah layak huni 80%; akses air bersih mencapai 90%; penyerapan KUR 98%; produktivitas pertanian tinggi di Kabupaten Sleman dan Bantul; akses transportasi antar kabupaten lancar dan baik. Wirausaha mikro di sektor kuliner dan pariwisata bertambah banyak. Program pendidikan (PIP + BOS) kemungkinan membantu menjaga partisipasi sekolah dan meringankan beban rumah tangga miskin, sehingga

berkontribusi pada penurunan kemiskinan jangka menengah. Proporsi penduduk miskin di DIYogya meskipun menurun, namun masih tergolong tinggi (melebihi 2 digit), menurun dari 12,28% (2020) menjadi 10,83% (2024).

Berbeda dengan di Propinsi Kalimantan Barat, dimana distribusi bansos masih terkendala akses desa terpencil, kemiskinan ekstrem 1,8%; Akses air bersih baru mencapai 75%, penyerapan KUR relative rendah (60%) karena akses perbankan terbatas; petani kecil rentan pada harga; akses pelabuhan dan bandara kecil meningkat. Meskipun terdapat tantangan distribusi ke daerah terpencil dan validitas data, PIP/BOS membantu meringankan biaya Pendidikan dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Proporsi penduduk miskin di propinsi Kalimantan Barat semakin berkurang, dari 7,17% tahun 2020 menjadi 6,32% pada tahun 2024.

Pulau Kalimantan diuntungkan oleh sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, dan migas), tetapi karakteristik ekonominya yang berbasis ekstraktif membuat kemiskinan bersifat spasial: terkonsentrasi di daerah pedalaman dan masyarakat adat. Infrastruktur sosial belum merata, sementara transformasi ekonomi menuju hilirisasi masih dalam tahap awal.

Kinerja program pengentasan kemiskinan di Propinsi Papua belum menggembirakan. Hal ini tampak pencapaian bantuan sosial masih rendah (65%), ekstrem tergolong tinggi (7%); program infrastruktur berjalan lambat (progress sekitar 55%), literasi dan jaringan pasar UMKM masih minim (35%); produktivitas pertanian rendah; ketergantungan pada bantuan benih dan pupuk tinggi; biaya transportasi udara untuk membantu logistik ke daerah 3T sangat tinggi. Penyaluran PIP terfokus pada kabupaten terpencil meski harus diperhadapkan dengan kendala geografis, kualitas layanan pendidikan relative rendah, validitas data kependudukan (NIK/NISN) dan ketimpangan antar kabupaten. PIP/BOS/KIP membantu mengurangi biaya Pendidikan bagi keluarga miskin. Meskipun semakin menurun, proporsi penduduk miskin di Propinsi Papua masih tergolong tinggi, yakni 26,64% tahun 2020 dan 17,7% tahun 2024.

Pengentasan kemiskinan di Pulau Papua diperhadapkan pada tantangan multidimensi: geografis, sosial, budaya, dan politik. Tingkat keterisolasian tinggi menyebabkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terbatas. Selain itu, efektivitas penyaluran bantuan sosial sering terkendala oleh logistik dan data kependudukan. Meskipun ada peningkatan belanja otonomi khusus (Otsus), dampaknya belum signifikan dalam menurunkan kemiskinan struktural.

Untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perbedaan pencapaian proporsi penduduk miskin di masing-masing propinsi, selain karena program yang tumpang tindih antar Kementerian, ketepatan sasaran (DTKS), kecepatan distribusi, dan keterhubungan ke jalur pemberdayaan (graduation), juga dikarenakan factor-faktor berikut:

1) Struktur Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Provinsi dengan transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri/jasa memiliki kapasitas menyerap tenaga kerja yang lebih produktif sehingga pendapatan rumah tangga meningkat. Jika pertumbuhan PDRB tidak disertai penciptaan lapangan kerja lokal, manfaat pertumbuhan tidak menyebar kepada kelompok miskin (*growth without pro-poor jobs*). Oleh karena itu, indikator share sektor dan pertumbuhan PDRB per kapita menjadi determinan kuat perbedaan provinsi. World Bank (2023) menekankan bahwa pekerjaan (*jobs*) adalah jalur terkuat keluar dari kemiskinan dan bahwa ketergantungan pada pertanian membatasi mobilitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif (diiringi penciptaan lapangan kerja formal/berketerampilan) mempercepat penurunan kemiskinan; provinsi yang tumbuh tetapi kurang menyerap tenaga kerja miskin melihat kemiskinan stagnan. Studi juga menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan inklusif dan penurunan kemiskinan. Data menunjukkan

bahwa provinsi dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional (Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur) cenderung memiliki penurunan kemiskinan yang konsisten. Sebaliknya, daerah yang mengandalkan sektor primer (NTT, Papua, Maluku) mengalami stagnasi. Ketimpangan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah yang belum mengalami transformasi struktural.

2) Infrastruktur dan Konektivitas Pasar

Akses jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan harga yang diterima produsen kecil. Provinsi yang lebih cepat mengembangkan infrastruktur pasar umumnya menurunkan kemiskinan lebih cepat karena peningkatan pasar lokal dan regional. Program tol laut dan perbaikan konektivitas terbukti membantu menurunkan disparitas harga antar-wilayah, tetapi perlu tersambung ke program pemberdayaan ekonomi lokal agar berdampak pada kemiskinan.

Akses infrastruktur menurunkan biaya transaksi dan membuka akses pasar — provinsi yang mengalami perkembangan infrastruktur lebih cepat biasanya menunjukkan penurunan kemiskinan yang lebih baik. Penelitian kuantitatif pada konteks Indonesia mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan pengurangan disparitas/pengaruh pada pendapatan.

3) Kapasitas Fiskal Daerah dan Pola Belanja Publik

Kemampuan pemerintah provinsi/kabupaten untuk menyalurkan belanja sosial dan investasi infrastruktur mempengaruhi *outcome* pengentasan kemiskinan. Provinsi dengan PAD yang lebih tinggi dan prioritas belanja pada layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial) menunjukkan hasil lebih baik. Provinsi/kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal (PAD + DAU/DAK) lebih besar dapat membiayai program *pro-poor* lokal. Penelitian menunjukkan belanja publik di pendidikan dan kesehatan secara signifikan mengurangi kemiskinan di banyak daerah. Di sisi lain, ketergantungan penuh pada transfer pusat tanpa kapasitas implementasi lokal membatasi efektivitas.

4) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tinggi ditandai dengan tingkat pendidikan, dan status gizi (*stunting*) yang tinggi. IPM tinggi dapat dijadikan sebagai penentu kemampuan rumah tangga untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Provinsi dengan IPM relatif tinggi (akses pendidikan & kesehatan lebih baik) menunjukkan respons yang lebih baik terhadap program pelatihan dan akses kredit, sehingga percepatan penurunan kemiskinan lebih mungkin terjadi.

5) Digitalisasi dan Integrasi Data

Keberhasilan PKH, BPNT, dan program perlindungan sosial lainnya ditentukan oleh ketepatan sasaran (DTKS), kecepatan distribusi, dan keterhubungan ke jalur pemberdayaan (*graduation*). Provinsi yang melakukan digitalisasi dan integrasi data mampu mengurangi kebocoran dan menyasar rumah tangga miskin ekstrem dengan lebih tepat. Namun, tanpa jalur keluar (mis. akses kerja/kredit), bantuan bersifat sementara. Pada umumnya, propinsi di pulau Jawa dan Sumatera digitalisasi dan integrasi data tergolong baik dan ternyata proporsi kemiskinan di propinsi tersebut lebih rendah dibandingkan propinsi di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua (BPS, 2024).

6) Kualitas Tata Kelola Lokal dan Koordinasi Lintas-Sektor

Efektivitas intervensi seringkali lebih ditentukan oleh kapasitas implementasi setempat ketimbang desain kebijakan pusat semata. Koordinasi lintas-kementerian (mis. integrasi kegiatan Kemensos, Kementan, KemenkopUKM, PUPR, Kemenhub) melalui forum-provinsi dan

pemanfaatan Satu Data Indonesia meningkatkan efisiensi sumber daya dan dampak program. Tumpang tindih program antarinstansi tetap menjadi hambatan utama tanpa adanya mekanisme koordinasi dan penyalarsan anggaran.

Ketidaktepatan sasaran (*targeting inaccuracy*) menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan program sosial di Indonesia. Kesalahan ini terbagi menjadi dua: *inclusion error*, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya tidak tergolong miskin, dan *exclusion error*, yaitu masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. Studi oleh World Bank (2020) dan Suryahadi, *et al* (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 25% penerima manfaat program sosial di Indonesia mengalami salah sasaran akibat data yang tidak mutakhir dan lemahnya verifikasi lapangan. Dalam perspektif Teori Kelembagaan Baru, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh tata kelola institusional, koordinasi antarlembaga, dan kapasitas implementasi pemerintah daerah.

7) Perbedaan ukuran, urbanisasi, dan ketimpangan internal provinsi

Provinsi besar/terpencar (Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku) menghadapi tantangan logistik dan biaya pelayanan yang tinggi; sementara provinsi urban (Jawa, Bali) punya dinamika berbeda—urbanisasi dapat menurunkan atau menambah kemiskinan bergantung pada penyerapan kerja dan pelayanan sosial. BPS menunjukkan perbedaan urban/rural dalam data kemiskinan. Dalam beberapa studi evaluatif Kementerian Sosial (2023), ditemukan bahwa tingkat keberhasilan program PKH lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding pedesaan terpencil, bukan karena programnya berbeda, tetapi karena faktor geografis dan ketepatan data.

4.2. Mencapai Target SDGs Kemiskinan Nol Persen, mungkinkah?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang pertama adalah tercapainya kemiskinan nol persen pada tahun 2030. Seperti telah dibahas di atas, berbagai program telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dan hasilnya hingga tahun 2024 masih ada penduduk miskin sebanyak 24,06 juta jiwa (9,36%). Dengan waktu 6 tahun tersisa menuju tahun 2030, dapatkah tercapai kemiskinan nol persen?

Berdasarkan hasil perhitungan, kemiskinan nol persen tidak terwujud pada tahun 2030. Proyeksi kemiskinan Indonesia tahun 2030 semakin menurun, namun masih jauh dari nol persen, yakni 5,43%. Meski secara nasional tidak mungkin mencapai target nol persen di tahun 2030, namun ada beberapa propinsi yang berpotensi mencapai target kemiskinan nol persen. Di antara 38 propinsi, ada 4 propinsi yang berpotensi mencapai kemiskinan nol persen di tahun 2030. Di antara 38 propinsi, ada 4 propinsi yang berpotensi mencapai kemiskinan nol persen di tahun 2030, yaitu propinsi Bali dengan proporsi kemiskinan 1,0%; Kalimantan Selatan dengan proporsi kemiskinan 1,1%; DKI Jakarta dengan proporsi kemiskinan 1,3% dan propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan proporsi kemiskinan 1,55%, lihat Tabel 4.2. Jika target rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% periode 2025-2029 tercapai, besar kemungkinan kemiskinan nol persen di 4 propinsi ini bisa terwujud/tercapai.

Meskipun bukan mustahil, target kemiskinan nol persen pada tahun 2030 secara realistis sulit tercapai di Indonesia. Alasan utamanya adalah : (1) Tren penurunan kemiskinan melambat ; (2) Ketimpangan wilayah tinggi, tergambar dari kemiskinan di Papua >25%, sedangkan di DKI Jakarta <5% ; (3) Banyaknya rumah tangga “nyaris/rentan miskin” (sedikit di atas garis kemiskinan), mudah jatuh miskin lagi jika terjadi guncangan (seperti pandemi/wabah penyakit; inflasi pangan, PHK) ; (4) kesulitan akses meningkatkan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, air bersih dan pekerjaan layak.

Tabel 4.2. Proyeksi Penduduk Miskin 2030 Menurut Propinsi di Indonesia (%)

No.	Propinsi	P2024 (%)	r (%)	P2030 (%)	No.	Propinsi	P2024 (%)	r (%)	P2030 (%)
1.	Aceh	14,23	0,8	9,43	20.	Kalimantan Barat	6,32	0,6	2,72
2.	Sumatera Utara	7,99	0,6	4,39	21.	Kalimantan Tengah	5,17	0,6	1,57
3.	Sumatera Barat	5,97	0,6	2,37	22.	Kalimantan Selatan	4,11	0,5	1,11
4.	Riau	6,67	0,6	3,07	23.	Kalimantan Timur	5,78	0,6	2,18
5.	Jambi	7,1	0,6	3,5	24.	Kalimantan Utara	6,32	0,6	2,72
6.	Sumatera Selatan	10,97	0,8	6,17	25.	Sulawesi Utara	7,25	0,6	3,65
7.	Bengkulu	13,56	0,8	8,76	26.	Sulawesi Tengah	11,77	0,8	6,97
8.	Lampung	10,69	0,8	5,89	27.	Sulawesi Selatan	8,06	0,6	4,46
9.	Kep. Bangka Belitung	4,55	0,5	1,55	28.	Sulawesi Tenggara	11,21	0,8	6,41
10.	Kepulauan Riau	5,37	0,6	1,77	29.	Gorontalo	14,57	0,8	9,77
11.	DKI Jakarta	4,3	0,5	1,3	30.	Sulawesi Barat	11,21	0,8	6,41
12.	Jawa Barat	7,46	0,6	3,86	31.	Maluku	16,05	1,5	7,05
13.	Jawa Tengah	10,47	0,8	5,67	32.	Maluku Utara	6,32	0,6	2,72
14.	DI Yogyakarta	10,83	0,8	6,03	33.	Papua Barat	21,66	1,5	12,66
15.	Jawa Timur	9,79	0,6	6,19	34.	Papua	17,7	1,5	8,7
16.	Banten	5,84	0,6	2,24	35.	Papua Selatan	17,44	1,5	8,44
17.	Bali	4	0,5	1	36.	Papua Tengah	29,76	1,5	20,76
18.	Nusa Tenggara Barat	12,91	0,8	8,11	37.	Papua Pegunungan	32,97	1,5	23,97
19.	Nusa Tenggara Timur	19,48	1,5	10,48	38.	Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A
					Indonesia				9,03
									0,6
									5,43

Ket. : P2024 = Proporsi penduduk miskin (%) ; r = rata-rata penurunan kemiskinan ; P2030 = proyeksi proporsi penduduk miskin (%) ; $P2030 = P2024 - (r \times 6)$

Beberapa penelitian terbaru memberikan gambaran empiris tentang dinamika kemiskinan di Indonesia. Menurut World Bank (2023), penurunan kemiskinan di Indonesia berjalan lambat setelah pandemi COVID-19 akibat menurunnya daya beli dan melemahnya pasar kerja informal. Studi Bappenas (2023) menunjukkan bahwa target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 sulit tercapai karena adanya keterbatasan fiskal daerah dan ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial.

Penelitian oleh Suryahadi *et al.* (2021) menemukan bahwa program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT efektif mengurangi kemiskinan sementara, namun kurang berdampak terhadap kemiskinan kronis yang dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas dan ketimpangan pendidikan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur digital dan fisik di luar Jawa, terutama di Kalimantan dan Papua, masih menjadi faktor penentu utama ketertinggalan ekonomi.

UNDP (2024) juga menyoroti bahwa keberhasilan pencapaian SDGs di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menerjemahkan target global ke dalam konteks lokal. Pendekatan *localization of SDGs* menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif di berbagai wilayah.

Mencermati pencapaian angka kemiskinan di Indonesia hingga 2024, dapat dinyatakan bahwa kemiskinan nol persen 2030 sangat sulit dicapai dan masih banyak hambatan yang harus diatasi. Setidaknya ada empat hambatan utama yang menghambat pencapaian target *kemiskinan nol persen* tahun 2030, yaitu : (1) Ketimpangan Pembangunan Spasial ; (2) Keterbatasan Infrastruktur Dasar ; (3) Kualitas SDM dan Pendidikan Rendah; (4) Efektivitas Tata Kelola dan Pendataan

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan evaluasi lintas kementerian menunjukkan masih adanya tumpang tindih program antara Kemensos, Kemenkop-UKM, dan Kementan dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa daerah menerima intervensi ganda tanpa koordinasi, sementara wilayah lain justru belum tersentuh.
2. Terjadinya perbedaan pencapaian proporsi penduduk miskin di masing-masing provinsi, selain karena program yang tumpang tindih antar Kementerian, ketepatan sasaran (DTKS), kecepatan distribusi, dan keterhubungan ke jalur pemberdayaan (graduation), juga dikarenakan perbedaan (1) Struktur Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja, (2) Infrastruktur dan Konektivitas Pasar, (3) Kapasitas Fiskal Daerah dan Pola Belanja Publik, (4) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), (5) Digitalisasi dan Integrasi Data, (6) Kualitas Tata Kelola Lokal dan Koordinasi Lintas-Sektor dan (7) Perbedaan ukuran, urbanisasi, dan ketimpangan internal provinsi.
3. Bahwa target kemiskinan nol persen pada tahun 2030 di Indonesia, sulit terwujud secara nasional, namun terdapat 4 dari 38 provinsi yang berpotensi mencapai kemiskinan nol persen di tahun 2030. Sulitnya pencapaian nol persen ini dikarenakan adanya beberapa hambatan (1) Ketimpangan Pembangunan Spasial, (2) Keterbatasan Infrastruktur Dasar, (3) Kualitas SDM dan Pendidikan Rendah, (4) Efektivitas Tata Kelola dan Pendataan.

5.2. Rekomendasi

Pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti hingga terwujud kemiskinan nol persen. Strategi kemiskinan yang dilaksanakan selama ini perlu diubah dari kebijakan yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan produktif dan berkelanjutan. Pemberdayaan penduduk miskin dan rentan melalui program reskilling dan upskilling, integrasi beasiswa Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dilaksanakan di seluruh wilayah (perkotaan dan perdesaan). Agar tidak terjadi tumpang tindih program antar kementerian dan salah sasaran, perlu dilakukan program pemanfaatan *Big Data* dan *AI* untuk identifikasi rumah tangga miskin dan kebijakan intervensi, Dashboard integrasi kemiskinan nasional yang menggabungkan data lintas kementerian. dan pengawasan digital partisipatif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Addae-Korankye, A. (2019). Theories of poverty: A critical review. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 48, 55-62. DOI: 10.7176/JPID/48-08
- Alisjahbana, A. S. dan Murninigtas, E. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Konsep, Target dan Strategi Implementasi. Unpad Press, Bandung.

- Alisjahbana, A. (2021). Vocational Training and Labor Productivity in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45–60. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1395>
- Badan Pusat Statistika, (2024), *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- Bappenas. (2017). Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Bappenas (2023). *Laporan Pencapaian SDGs Indonesia 2023*. Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Danaan, V. V. (2018). Analyzing poverty in Nigeria through theoretical lenses. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 20-31. <https://dx.doi.org/10.5539/jsd.v11n1p20>
- Djabar, Dewi Afriani, Fahrudin Zain Olilingo dan Ivan Rahmat Santoso (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. *Jurnal Ekombis Review*, Vol. 10 No. 2, halaman 581 – 588.
- Dunn, W.N. (2018), Publik Policy Analysis : *An Integrated Approach*. Taylor & Francis.
- Hashim, A. T., Osman, R., Badioze-Zaman, F. S. (2016). Poverty challenges in education context: A case study of the transformation of the mindset of a non-governmental organization. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 3(11), 40-46.
- Hamzah, A. 2012. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia : realita dan pembelajaran. *Jurnal AKK*, Vol.I(1). Diunduh dari <http://www.e-jurnal.com/2014/11/kebijakan-penanggulangan-kemiskinan-dan.html>
- Kementerian Sosial (2024), *Data dan evaluasi kebijakan nasional 2023–2024*, Jakarta.
- Kementerian PUPR (2024), *Evaluasi Program KOTAKU, BSPS Dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*, Jakarta.
- Kompas.id. (2023), “Bansos Tidak Tepat Sasaran, Negara Rugi Ratusan Milyar per Bulan <https://www.kompas.id/artikel/bansos-tidak-tepat>.”
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.
- Lindrianti , Nur Fita, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Alokasi Dana Dari Pusat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal Of Economics* , Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 46 – 56.
- Mualifah, Nur (2019). Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bumi Rahardjo Dalam Persepektif Islam. <https://repository.metrouniv.ac.id/>
- Omeje, A. N., Chukwu, N. O., & Isiwu, P. C. (2022). Inequality and regional poverty in Nigeria: A decomposition analysis from Foster-Greer-Thorbecke index. *Research Square Preprint*, 1-17. DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1643417/v1>.
- Omideyi, A. K. (2007). Poverty and development in Nigeria: Trailing the MDGs?. *African Journal of Infect. Diseases*, 1(1), 3-17. DOI: 10.4314/ajid.v1i1.42088.
- Pratama, Nanda Bhayu, Eko Priyo Purnomo dan Agustiyar (2020). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 6(2); halaman 64-74. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio>.
- Rahmatullah, Ricky, Teguh Endaryanto dan M. Irfan Affandi, (2021). Pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGS)* Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *Jurnal Tata Loka*, Volume 23, Nomor 2. Halaman 239-251.

- Shamim, T. (2022). Nurkse's model of vicious circle of poverty theory: Is it applicable to dental profession in India. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(3), 1221-1222. DOI: 10.4103/jfmpe.jfmpe_660_21.
- Sinaga, W. H. (2018). *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Perjuangan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati & Athia Yumma (2021), The Impact of Covid-19 and Social Protection Programs on Poverty in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.57, pp.267-296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C, (2011). *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1 (edisi 11). PT.Erlangga, Jakarta.
- Yacoub, Y., & Lestari, N. (2019). Flypaper effect in Indonesia: The case of Kalimantan. *Pp*.116–121.
- World Bank (2020). *Etiophia Poverty Assessment, Harnessing Continued Growth for Accelerated Poverty Reduction*, World Bank Group, www.worldbank.org.
- World Bank (2023). *Indonesia Poverty Assessment: Towards Inclusive and Sustainable Recovery*. Washington, D.C: World Bank.